

POLITIK PEMBANGUNAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA: ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KETIMPANGAN DAERAH

Devrichan Syahputra Zalukhu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

devrichansyahputra99@gmail.com

Aditya Rahman Zalukhu

Universitas Muhammadiyah Surakarta

cintatauhid4217@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan politik pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi ketimpangan antar daerah. Ketimpangan tersebut mencakup ketidakmerataan dalam akses terhadap infrastruktur, layanan sosial, dan peluang ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor struktural, historis, dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan pembangunan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pembangunan yang signifikan, kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Faktor birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta ketergantungan pada sektor sumber daya alam menjadi kendala utama dalam pencapaian tujuan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Kata Kunci: Politik Pembangunan, Ketimpangan Antar Daerah, Sumatera Utara.

Abstract

This study aims to analyze the development policy implemented by the Provincial Government of North Sumatra in addressing regional disparities. These disparities include inequalities in access to infrastructure, social services, and economic opportunities between urban and rural areas. Using a qualitative approach, this research identifies the structural, historical, and economic factors influencing development policies and their impact on public welfare. The findings indicate that despite significant development efforts, the policies implemented have not been entirely effective in reducing disparities, particularly in more remote areas. Bureaucratic issues, lack of coordination among agencies, and dependence on natural resource sectors are the main obstacles to achieving equitable development goals. Therefore, this study recommends a more inclusive and collaborative approach in the planning and implementation of development policies.

Keywords: Development Politics, Regional Disparities, North Sumatra

PENDAHULUAN

Politik pada mulanya diperkenalkan disebuah Negara yang peradabannya sangat maju kala itu yaitu Yunani, dengan banyaknya para filsuf disana, maka politik

menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat disana. Politik dalam bahasa Yunani disebut “Polis” yang bermakna kota yang berstatus negara. Menurut Istilah politik dapat dimaknai sebagai kegiatan yang bertujuan sebagai sistem yang bergerak menuju sebuah tujuan dalam menentukan sebuah keputusan, kebijakan umum, serta sebagai alat kekuasaan untuk mendapatkan wewenang.¹ Jika ditarik dari titik balik pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa politik menjadi agenda jangka panjang bagi sebagian orang yang berkepentingan, hal ini juga sesuai dengan pengertian politik oleh sebagian ahli, misalnya Miriam Budhiarjo yang mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang beraneka ragam yang terjadi disebuah negara sebagai upaya dalam mencapai sebuah kebijakan terbaik untuk ketatanegaraan.²

Setelah memahami secara sederhana dari pengertian politik, maka kita akan memahami bagaimana pengertian politik pembangunan untuk upaya kebijakan dalam negara terkait. Sebelum kita membahas tentang politik pembangunan, maka perlu dipahami secara mendasar terlebih dahulu tentang pengertian dari pembangunan, Istilah pembangunan yaitu arah kemajuan yang menuju ketujuan yang lebih luas baik itu dilakukan oleh individu, maupun kelompok.³ Dalam mencapai sebuah pemangunan yang efektif memang dibutuhkan orang yang dapat menjadi pembawa pembangunan tersebut, tentunya ini akan berkaitan dengan politik pembangunan yang akan dibahas.

Dari pemahaman kedua konsep diatas, dapat terlihat jelas bahwa politik pembangunan mengandung konsep yang menjelaskan bagaimana strategi ataupun konsep yang dibuat sebagai senjata utama dalam konteks pembangunan hal ini tentu demi mencapai sasaran empuk suatu instansi, partai politik ataupun para badan legislative, yudikatif maupun eksekutif dalam mencapai pembangunan yang diinginkan. Dalam melaksanakan politik pembangunan harus ada beberapa variabel yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan politik antara lain:

1. Adanya aktor yang dapat melaksanakan politik pembangunan
2. Adanya kekuasaan yang memiliki wewenang dalam proses pembangunan
3. Adanya Ideologi sebagai sistem utama
4. Intervensi dari pihak⁴

Dalam politik pembangunan kali ini, akan berhubungan erat dengan wilayah provinsi Sumatera Utara. Untuk itu perlu memahami terlebih dahulu tentang Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan berbagai keragaman budaya serta etnis suku bangsa yang beragam disana, keberagaman ini dilatar belakangi oleh faktor sejarah, geografi, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sumatera Utara dapat dikatakan sebagai contoh kecil dari keberagaman serta multicultural di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan slogan bangsa kita yaitu Bhineka Tunggal Ika (biar berbeda-beda tetapi tetap satu juga). Jika ditarik dari sejarah awal, nama Sumatera berawal dari keberadaan Kerajaan Samudera (letaknya di pesisir timur Aceh). Sumatera Utara berdiri pada tanggal 5 April 1948 sebagai keabsahannya sebagai provinsi di Sumatera Utara, yang begitu luas hingga sampai ujung kepulauan Nias yang berada dipesisir Barat dan berbatasan dengan aceh sebelah Utara, Sumatera Barat serta Riau

¹Fajar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik* (Keamanan dan Kesejahteraan), Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, h. 2

²Fajar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik* (Keamanan dan Kesejahteraan), h. 3

³Desi, *Pembangunan*, Yogyakarta: Lambung Pustaka UNY, 2013, h. 16

⁴Warjio, Ph.D, *Politik Pembangunan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016, h. 141

disebelah Selatan dengan dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Kota Medan.⁵

Secara geografis, Sumatera Utara berbatasan dengan selat sunda disebelah selatan, berbatasan dengan teluk benggala disebelah utara, serta berbatasan dengan samudera Hindia disebelah barat, dan dengan selat malaka disebelah timur. Luas wilayah Sumatera Utara adalah sekitar 265,10 km² serta penduduknya mencapai 2.460.858 jiwa.⁶ Dengan berbagai suku etnis, luasnya wilayah Sumatera Utara ini, serta kaitan yang relevan dengan penelitian kali ini, dapat dipahami secara latar belakang bahwa polemic politik pembangunan di Sumatera Utara ini, sangat penting untuk diangkat sebagai sebuah studi kasus, baik dilihat secara teoritis maupun praktis.

Kajian terdahulu tentang Politik pembangunan telah ada beberapa fokus yang terkait baik itu dalam bentuk teori maupun yang berkaitan dengan fakta lapangan layaknya studi kasus yang mengarah pada wilayah tertentu antara lain: “Ekonomi politik pembangunan infrastruktur dan kepentingan kapital” yang ditulis oleh Muhammad Ridha dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana politik pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi mengarah pada titik apa dan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari politik pembangunan hal ini juga berkaitan dengan infrastruktur dan penciptaan skemal keuangan local, regional dan internasional. Dalam pembahasannya dia juga melihat dari pemikiran karl marx tentang penciptaan nilai dalam kapitalisme yang difasilitasi dengan pendistribusian jalan ekonomi terkait dari observasinya ditemukan bahwa betapa seramnya politik pembangunan karena lebih memberikan manfaat kepada oligarki dibandingkan masyarakat banyak.⁷

Dalam penelitian yang relevan, adapula judul sebuah jurnal terkait yaitu “Analisis Aktor Politik Pembangunan Dalam Organisasi Al Washliyah Sumatera Utara” yang ditulis oleh M. Fathin Arditri, Humaizi, dan Heri Kusmanto, yang dalam jurnal ini fokus kepada tokoh nasional yang menjadi ketua pimpinan wilayah al Washliyah Sumatera Utara dengan perannya tersebut, maka dia juga berperan dalam pembentukan politik pembangunan di al Washliyah yaitu pendidikan, dakwah dan Amal sosial. Sebagai aktor politik yang berperan penting dalam politik pembanguana di al Washliyah, berhasil atau tidaknya program yang dianulirnya merupakan tugas utama seorang aktor utama. Hal ini juga berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi yang digunakan oleh Dedi Iskandar, baik dalam bidang dakwah maupun efisiensi dalam melaksanakan program lewat jalur tekonologi sebagai penghematan biaya, penulis menyimpulkan bahwa tidak begitu banyak kendala berarti yang dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan beliau cukup berhasil.⁸

Masalah yang akan dikaji meliputi pada tiga hal utama antara lain, bagaimana dinamika kebijakan politik pembangunan di Provinsi Sumatera Utara berinteraksi dengan berbagai aktor politik dan sosial dalam upaya mengatasi ketimpangan antar daerah yang terjadi diwilayah tersebut. Kedua, apa saja faktor struktural, historis, dan ekonomi yang secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar

⁵William Marsden, Fadrijah Nurdiarsih, *Sejarah Sumatera*, Tim Komunitas Bambu, diakses tanggal 23 Januari, 2025, pukul 16.30 wib, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2946

⁶Nizar Aldi, *Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Medan Tahun 2022*, detikSumut, diakses pada tanggal 23 Januari, 2025, pukul 18.00, <https://www.detik.com/sumut/berita/d6098240/jumlah-dan-kepadatan-penduduk-di-kota-medan-tahun-2022-cek-di-sini#:~:text=kota%20Medan%20merupakan%20ibu%kota,858%20jiv%20pada%20tahun%20ini>.

⁷Muhammad Ridha, *Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur dan Kepentingan Kapital*, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

⁸M. Fathin Arditri dkk, *Analisis Aktor Politik Pembangunan Dalam Organisasi Al Washliyah Sumatera Utara*, Medan: Universitas Medan Area, 2022.

daerah di provinsi Sumatera Utara, dan kebijakan pemerintah menanggapi tantangan tersebut. Ketiga, sejauh mana kebijakan politik pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara efektif dalam menanggulangi ketimpangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur antar daerah, serta apa hambatan utama yang dihadapi dalam implementasinya.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami lebih mendalam tentang dinamika ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat disparitas yang cukup tinggi antar daerah perkotaan dan pedesaan serta dengan berbagai antara kabupaten kota didalamnya. Meskipun kebijakan pembangunan telah banyak diterapkan, ketimpangan antardaerah masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi. Penelitian ini begitu penting karena dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pembangunan yang diterapkan di Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik. Dengan menganalisis kebijakan politik pembangunan yang ada, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang berpengaruh terhadap ketimpangan antardaerah. Selain itu, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memberikan dasar analitis bagi pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan nasional, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan antara faktor politik, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan daerah. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Utara. Secara keseluruhan penelitian ini tidak hanya penting bagi akademisi tetapi juga sangat penting bagi pengambil kebijakan dari berbagai pihak di Sumatera Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang kebijakan politik pembangunan yang diterapkan di Sumatera Utara serta dampaknya terhadap ketimpangan antardaerah, sumber utama dari penelitian ini berupa buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait yang membahas politik pembangunan di Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif tentang ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Politik Pembangunan Di Sumatera utara

Dalam kebijakan yang relevan, pengembangan wilayah memiliki kompleksitas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi suatu wilayah tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dari potensi yang dimiliki sebuah wilayah dengan pelaksanaan konsep otonomi daerah.⁹ Dalam proses pengembangan wilayah harus meliputi tiga hal utama yaitu: proses perencanaan tata ruang wilayah, proses pemanfaatan ruang, serta proses pengendalian pemanfaatan ruang. Provinsi Sumatera Utara dengan memiliki beraneka ragam suku etnis dan budaya, maka pengembangan wilayah yang akan di implementasikan harus sesuai dengan beberapa pluralitas yang dimaksudkan, hal ini dilakukan agar dalam proses pembangunan sebuah wilayah akan ada kesetaraan sesuai

⁹Hariyanto, & Tukidi, *Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Geografi-FIS Unnes, h. 4

dengan kebutuhan daerah yang dimaksud. Dengan kata lain kebijakan pihak yang berkepentingan dalam pembangunan ini sangatlah dibutuhkan.¹⁰

Provinsi Sumatera Utara memiliki varisitas dalam melakukan pengembangan sebuah wilayah, misalnya Danau Toba yang di gadang-gadang sebagai tempat wisata Internasional, belum juga mencapai targetnya sebagai pasar pariwisata, sehingga dapat terlihat bahwa sasaran dan target pengembangan daerah yang belum tercapai di Sumatera Utara.¹¹ Banyak sekali destinasi wisata berbasis bahari layaknya daerah lain yang sudah Internasional, antara lain Pulau Nias dengan julukan surga tersembunyinya. Koordinasi antara pemerintah kota/kab dengan pemerintah provinsi tentang pengembangan pariwisata dirasa masih kurang mumpuni, padahal secara geografis wilayah nias dengan pantai pasir putihnya dan juga ombak untuk surfing sudah terkenal didunia internasional tapi masih kurang di akomodir oleh pemerintah setempat sehingga pengenalan pariwisata dapat terjangkau dalam bidang domestik dan internasional layaknya pulau dewata Bali. Pengembangan wilayah seperti ini yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi Sumatera Utara. Dalam mendalami berbagai kebijakan pengembangan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan konsep pluralitas antara lain:

1. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat Sumatera Utara merupakan pertimbangan dan modal sosial dalam pengembangan wilayah Sumatera Utara. Kearifan lokal sebagai sarana terbaik dalam fasilitas pendukung pengembangan wilayah Sumatera Utara untuk tetap mempertahankan nilai kearifan lokal ditengah pengembangan wilayah tingkat daerah bahkan desa.¹²

2. Aspek Politik

Secara politik kebijakan pengembangan wilayah di Sumatera Utara sangat ditentukan oleh seberapa jauh keberhasilan peningkatan kualitas publik dengan penandaan pengembangan kinerja instansi terkait, misalnya dapat dilihat dari pengembangan wilayah kaldera Toba yang masih sangat tertinggal jauh padahal Provinsi Sumatera Utara sangat memprioritaskan Danau Toba, akan tetapi hal ini begitu ironis sehingga Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan danau Toba, Provinsi Sumatera Utara masih jauh dari kata maju layaknya pulau dewata Bali.¹³

3. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi dilihat dari pengembangan wilayah terlihat dari berbagai sudut pandang kebijakan pemerintah yang dijalankan seperti anggaran, ataupun pengelolaan keuangan dari aspek yang terlihat bahwa peran pemerintah sangatlah penting didalamnya. Dalam perkembangan globalisasi perlu dilihat bahwa persaingan ekonomi bahkan antar provinsi terus terjadi. Didalam pemerintah provinsi Sumatera Utara masih banyak sekali ketimpangan ekonomi yang menyebabkan kerumitan bagi para masyarakatnya.

Faktor Struktural, Historis, Dan Ekonomi Dalam Pengaruhnya Dengan Pengembangan Politik Pembangunan Sumatera Utara

¹⁰Yulyana, N. L., *Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2019, h. 3

¹¹Rusyidi, B. & Fedryansyah, M, *PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT*, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), h. 155

¹²Purwanto, E & Ritonga K, *Pengaruh Evaluasi Kebijakan Publik, Biaya Sambung Pada Minat Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2017, h. 14.

¹³Nawi, R, *Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan*, PLENO JURE, h. 4.

1. Faktor Struktural

Faktor struktural di Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan birokrasi yang ada. Pembangunan politik di wilayah ini sering kali dipengaruhi oleh adanya struktur pemerintahan yang bersifat sentralistik pada masa Orde Baru. Birokrasi yang terpusat menyebabkan peran aktor politik lokal dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas. Pengaruh ini masih terasa pasca-reformasi, meskipun ada upaya desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk berperan dalam pembangunan. Kekuatan struktural seperti itu menentukan bagaimana kebijakan pembangunan dijalankan dan bagaimana pengaruh politik lokal bekerja dalam merumuskan kebijakan.¹⁴

Faktor struktural dalam pengembangan politik pembangunan di Sumatera Utara juga terkait dengan dinamika politik lokal, yang sering kali terpengaruh oleh hubungan antara elit politik lokal dan pemerintah pusat. Dalam hal ini, hubungan patronase menjadi sangat signifikan. Politik patronase sering kali mengatur bagaimana pembangunan didistribusikan di tingkat daerah, dengan elite lokal yang memiliki koneksi kuat dengan pemerintahan pusat memanfaatkan jaringan tersebut untuk mendapatkan akses terhadap proyek pembangunan. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan antarwilayah di Sumatera Utara, dengan daerah-daerah yang memiliki akses politik lebih baik cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dalam kebijakan pembangunan.

Politik patronase ini juga menciptakan ketergantungan politik masyarakat terhadap aktor-aktor tertentu, yang sering kali digunakan untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum atau memilih pejabat publik. Akibatnya, pengambilan keputusan pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan politik jangka pendek daripada visi jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Faktor Historis

Secara historis, Sumatera Utara memiliki latar belakang yang sangat beragam dalam hal etnisitas dan sejarah perjuangan politik. Sejak masa kolonial, Sumatera Utara telah menjadi kawasan yang penting dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan Belanda, dengan berbagai gerakan nasionalis yang tumbuh di sana. Setelah Indonesia merdeka, kondisi politik yang tidak stabil, terutama pada masa awal kemerdekaan, memberi dampak pada pembangunan politik di wilayah ini. Pasca-Orde Baru, adanya transisi politik membawa perubahan signifikan pada cara politik pembangunan dijalankan. Namun, warisan konflik dan ketidakstabilan politik masih terlihat dalam dinamika pembangunan saat ini.¹⁵

Dari perspektif historis, Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh pola-pola kolonial yang membentuk hubungan antara daerah dan pusat. Dalam masa penjajahan Belanda, daerah ini dijadikan sebagai kawasan penghasil komoditas ekspor utama seperti karet, kopi, dan tembakau. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Belanda, seperti jaringan kereta api dan pelabuhan, awalnya bertujuan untuk mendukung eksploitasi ekonomi kolonial. Dampak jangka panjang dari kebijakan kolonial ini adalah ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang masih terasa hingga saat ini.

¹⁴ Haris, A, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Studi Kasus Sumatera Utara*, Jakarta: LP3ES, 2004, h. 132-135.

¹⁵ Sihombing, S, *Sejarah Politik Sumatera Utara: Dari Masa Kolonial hingga Reformasi*. Medan: Pustaka Sinar Harapan, 2007, h. 50-53

Masa pasca-kemerdekaan juga dipenuhi dengan tantangan politik, di mana Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi yang kaya dengan keragaman etnis dan agama, harus menghadapi berbagai konflik horizontal yang mempengaruhi stabilitas politik dan sosial. Pemecahan masalah ini sering kali membutuhkan pendekatan berbasis rekonsiliasi dan penguatan identitas lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai nasional.

3. Faktor Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari pertanian, perikanan, hingga sektor energi seperti minyak dan gas. Ekonomi daerah ini sangat bergantung pada sumber daya alam, yang mempengaruhi struktur pembangunan politik yang ada. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya alam ini sering kali menjadi titik ketegangan dalam dinamika politik pembangunan, terutama dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang lebih berpihak pada investasi besar, sering kali mengabaikan kebutuhan pembangunan berbasis masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kelompok lokal.¹⁶

Dalam konteks ekonomi, selain ketergantungan pada sumber daya alam, Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam diversifikasi ekonomi. Meskipun sektor pertanian dan pertambangan masih dominan, terdapat usaha untuk mengembangkan sektor industri dan jasa. Namun, masih terdapat kendala dalam hal infrastruktur yang memadai dan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar global. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, yang mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, semakin dianggap penting dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dan menciptakan keadilan sosial.

Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan batu bara sering kali menjadi sumber konflik antara pemerintah daerah dan perusahaan besar yang berinvestasi di wilayah tersebut. Proyek-proyek besar sering kali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat lokal, yang pada gilirannya menambah ketegangan politik dan sosial. Oleh karena itu, model pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada keberlanjutan lingkungan dan sosial sangat diperlukan agar pembangunan di Sumatera Utara dapat lebih seimbang dan berkeadilan.

Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika politik pembangunan di Sumatera Utara, menciptakan tantangan serta peluang yang perlu dikelola secara bijaksana untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Kebijakan Politik Pembangunan Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Efektif Dalam Menanggulangi Ketimpangan Ekonomi, Sosial, Dan Infrastruktur Antar Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan berbagai kebijakan politik pembangunan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Ketimpangan ini seringkali tampak jelas antara daerah perkotaan yang lebih maju, seperti Medan, dengan daerah pedesaan yang relatif terbelakang. Pembangunan yang tidak merata ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil dan kurang berkembang.

Upaya pemerintah provinsi dalam mengatasi ketimpangan ini melibatkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan

¹⁶ Hidayat, E, *Ekonomi Politik Sumber Daya Alam di Sumatera Utara: Perspektif Pembangunan*, Medan: Penerbit Sari, 2010, h. 72-75.

ekonomi lokal, dan penguatan sosial. Salah satu program yang digagas adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih merata, guna meningkatkan konektivitas antara daerah-daerah yang lebih tertinggal dengan pusat-pusat ekonomi utama di Sumatera Utara. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka peluang kerja, serta mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya.¹⁷

Pembangunan ekonomi di Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, diversifikasi ekonomi, dan pengurangan ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Beberapa program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, peningkatan sektor pariwisata, dan penguatan industri kreatif lokal. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi daerah, tantangan utamanya adalah distribusi hasil pembangunan yang belum merata antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial, pemerintah juga memfokuskan pada program-program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Program-program ini antara lain meliputi pelatihan keterampilan, bantuan sosial untuk kelompok rentan, dan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih merata. Namun, efektivitas dari kebijakan ini seringkali terbentur oleh masalah birokrasi dan kurangnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan.¹⁸

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama dalam kebijakan politik pembangunan di Sumatera Utara. Infrastruktur yang baik menjadi faktor penting dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Salah satu kebijakan yang digulirkan adalah pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi besar. Pembangunan jalan dan jembatan baru di berbagai kabupaten/kota, seperti di wilayah Tapanuli, Langkat, dan Karo, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan aksesibilitas antarwilayah.

Namun, meskipun infrastruktur jalan semakin berkembang, tantangan utama yang dihadapi adalah masalah kualitas dan pemeliharaan infrastruktur yang belum optimal. Banyak daerah yang masih menghadapi kendala terkait dengan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Oleh karena itu, meskipun ada upaya pengurangan ketimpangan infrastruktur, hasil yang dicapai belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan.¹⁹

Meskipun berbagai kebijakan politik pembangunan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mengurangi ketimpangan antar daerah, masih ada tantangan besar dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah masalah korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang menghambat efektivitas proyek pembangunan. Selain itu, ketergantungan pada sektor sumber daya alam, yang cenderung tidak berkelanjutan, juga menjadi hambatan dalam menciptakan ekonomi yang lebih merata.

Kebijakan yang lebih inklusif, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta transparansi dalam

¹⁷Bambang, S, *Politik Pembangunan dan Ketimpangan Daerah di Indonesia: Kasus Sumatera Utara*. Jakarta: Pusat Studi Pembangunan, Universitas Indonesia. 2012. h. 112-115.

¹⁸Rina, M, *Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Sumatera Utara*. Medan: Lembaga Penelitian Pembangunan Sumatera Utara, 2015 hlm. 83-86.

¹⁹ Rahmad, D, *Infrastruktur Pembangunan dan Ketimpangan di Sumatera Utara*. Medan: Bina Media, 2018. h. 142-146.

pengelolaan anggaran, menjadi sangat penting untuk menciptakan hasil yang lebih adil. Pemerintah provinsi perlu terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pemerintahan daerah agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.²⁰

KESIMPULAN

Politik pembangunan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ketimpangan antar daerah yang disebabkan oleh faktor struktural, historis, dan ekonomi yang kompleks. Kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi, meskipun mencakup upaya peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemerataan layanan sosial, masih belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan yang ada. Pembangunan yang berfokus pada penguatan konektivitas antarwilayah dan distribusi sumber daya belum mampu mengatasi ketidakmerataan yang terus terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kendala dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan birokrasi, korupsi, dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal menghambat hasil yang optimal.

Pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam menanggulangi ketimpangan tersebut bergantung pada pengelolaan yang transparan, distribusi anggaran yang adil, dan kebijakan yang lebih berbasis pada kebutuhan masyarakat di daerah yang paling tertinggal. Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan perencanaan yang berbasis pada data, Provinsi Sumatera Utara dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan antar daerah secara signifikan.

Referensi

- Bambang, S. 2012. *Politik Pembangunan dan Ketimpangan Daerah di Indonesia: Kasus Sumatera Utara*. Jakarta: Pusat Studi Pembangunan, Universitas Indonesia.
- Desi, *Pembangunan*. 2013. Yogyakarta: Lambung Pustaka UNY.
- Fajar Tri Sakti. 2020. *Pengantar Ilmu Politik* (Keamanan dan Kesejahteraan), Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Haris, A. 2004. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Studi Kasus Sumatera Utara*. Jakarta: LP3ES.
- Hariyanto, & Tukidi, *Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Geografi-FIS Unnes.
- Hidayat, E. 2010. *Ekonomi Politik Sumber Daya Alam di Sumatera Utara: Perspektif Pembangunan*. Medan: Penerbit Sari
- M. Fathin Arditi dkk. 2022. *Analisis Aktor Politik Pembangunan Dalam Organisasi Al Washliyah Sumatera Utara*. Medan: Universitas Medan Area.
- Muhammad Ridha. 2016. *Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur dan Kepentingan Kapital*. Makassar: UIN Alauddin.
- Nawi, R. *Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan*. PLENO JURE.
- Purwanto, E & Ritonga . 2017. *Pengaruh Evaluasi Kebijakan Publik, Biaya Sambung Pada Minat Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2017.

²⁰Harris, A, *Evaluasi Kebijakan Politik Pembangunan di Sumatera Utara: Dari Ketimpangan Menuju Keadilan Sosial*, Jakarta: Penerbit Cendekia. 2020. h. 158-162.

- Rahmad, D 2018. *Infrastruktur Pembangunan dan Ketimpangan di Sumatera Utara*. Medan: Bina Media.
- Rina, M. 2015. *Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Sumatera Utara*. Medan: Lembaga Penelitian Pembangunan Sumatera Utara.
- Rusyidi, B. & Fedryansyah, M. *PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 1(3)*.
- Sihombing, S. 2007. *Sejarah Politik Sumatera Utara: Dari Masa Kolonial hingga Reformasi*. Medan: Pustaka Sinar Harapan.
- Warjio, Ph.D. 2016. *Politik Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Yulyana, N. L. 2019. *Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.